

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011). Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mendukung peningkatan taraf hidup rakyat dengan cara yang terencana, sadar, dan berkelanjutan guna mencapai kondisi yang lebih baik (Noviatamara et al., 2019). Proses pembangunan ekonomi melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan produksi barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Salah satu indikator keberhasilan Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang mempresentasikan output nasional suatu negara dan mengukur kemampuan suatu negara untuk meningkatkan outputnya melebihi tingkat pertumbuhan penduduk (Sutawijaya, 2010)

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat diukur dengan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Ekonomi dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah dirancang untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan menyediakan beberapa program kegiatan, sehingga menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mampu berkontribusi pada kesejahteraan. Peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu negara atau daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat tinggi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional dan kompleks yang menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan di beberapa negara berkembang salah satunya di Indonesia. Kemiskinan menjadi isu yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Kemiskinan dikatakan multidimensional karena melibatkan berbagai jenis kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer maupun non primer (Ketut Sudibia et al., 2013).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari tingkat harapan hidup, pendidikan dan standar hidup masyarakat di suatu negara atau daerah. Sebagai alat ukur kualitas fisik dan non-fisik penduduk yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu parameter penting dalam menilai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling terkait dan memberikan kontribusi satu sama lain (Lilya & Dewi, 2014). Tingkat Pembangunan manusia yang tinggi sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik dari segi teknologi maupun lembaga sebagai alat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka diukur dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja yang dinyatakan dalam persentase.

fenomena pengangguran, seperti halnya kemiskinan, mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pembelian barang dan jasa. Kondisi ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Oleh karena itu, penanganan masalah pengangguran menjadi krusial untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi (Putri et al., 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berbentuk kepulauan. Tercatat lebih dari 17.000 pulau dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Fenomena ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di setiap wilayah. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki karakteristik yang unik dan menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur menghadapi kesenjangan pembangunan yang cukup besar dibandingkan provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia. Kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2020-2023 (%)



Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 1.1, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur terus mengalami kenaikan. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur sempat mengalami penurunan hingga -0,84% akibat dari adanya pandemi *covid-19* dan di tahun-tahun selanjutnya menunjukkan pergerakan yang positif, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 3,52%, namun angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05%. Dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,52%, menjadikan provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi ketiga dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2023. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi pengembangan yang belum dioptimalkan dalam mendorong perekonomian daerah. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar pulau berdampak pada tingginya biaya logistik dan terhambatnya arus barang dan jasa, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, penyumbang terbanyak dalam PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,32%. Kedua, di sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan daur ulang sebesar 12,52%. Ketiga, di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 12,41%. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih ditopang oleh sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur muncul tidak dengan sendirinya. Sebagai provinsi yang perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian menjadi tantangan tersendiri karena dihadapkan

oleh kondisi iklim dan degradasi lahan (Kamsina & Khoirudin, 2024). Selain itu, tingkat investasi yang masuk masih rendah akibat persepsi risiko yang tinggi dan keterbatasan sarana penunjang. Jika dibandingkan dengan provinsi di wilayah timur seperti Provinsi NTB sebagai provinsi terdekat dari NTT sudah berhasil mengembangkan sektor pariwisata di Lombok yang lebih terintegrasi serta infrastruktur yang relatif lebih baik, terutama konektivitas antar pulau utama yaitu Lombok – Sumbawa yang memudahkan distribusi dan mobilitas penduduk. Berdasarkan data dari BPS Provinsi NTB, sektor pariwisata mampu menyumbang sebanyak 16,67% di pertumbuhan ekonomi provinsi NTB pada tahun 2022. Meskipun provinsi NTT juga memiliki banyak objek wisata, angka ini berbeda jauh dengan angka di Provinsi NTB yang hanya sebesar 13,56% di sektor pariwisata.

Kurangnya keterkaitan antara sektor ekonomi yang belum tercipta integrasi antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Meskipun memiliki potensi luar biasa, kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih minim. Sehingga menjadi salah satu faktor rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tingginya angka kemiskinan. Hal ini membuat Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menduduki peringkat ketiga dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Papua dan Papua Barat.

Gambar 1. 2 Grafik Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2020-2023 (%)



Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 1.2, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 mencapai 19,96%, nilai ini jauh diatas rata-rata nasional sebesar 9,36%, menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang signifikan antara Nusa Tenggara Timur dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang berbentuk kepulauan dengan jumlah 1.192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah berpenghuni menciptakan tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Beberapa wilayah di provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki topografi seperti gunung, yang mengakibatkan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi sulit ditempuh. Permasalahan lain disebabkan oleh intensitas musim hujan yang begitu rendah sehingga beberapa wilayah memiliki kondisi tanah tandus dan rendahnya tingkat kesuburan tanah. Akibatnya, mayoritas penduduk yang mengandalkan mata pencaharian dari bidang pertanian terpaksa menghadapi kegagalan panen yang pada akhirnya membuat kemiskinan menjadi tak terhindari (Kamsina & Khoirudin, 2024) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Prameswari et al., 2021) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengartikan bahwa setiap kenaikan angka kemiskinan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan sumber daya manusia menambah kompleksitas terhadap tantangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kualitas dan kuantitas tenaga profesional yang masih minim. Hal ini tercermin dalam grafik indeks pembangunan manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020-2023 dibawah ini

Gambar 1. 3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indoensia Tahun 2020-2023



Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 1.3 angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 68,40. Meskipun demikian, angka ini masih dibawah rata-

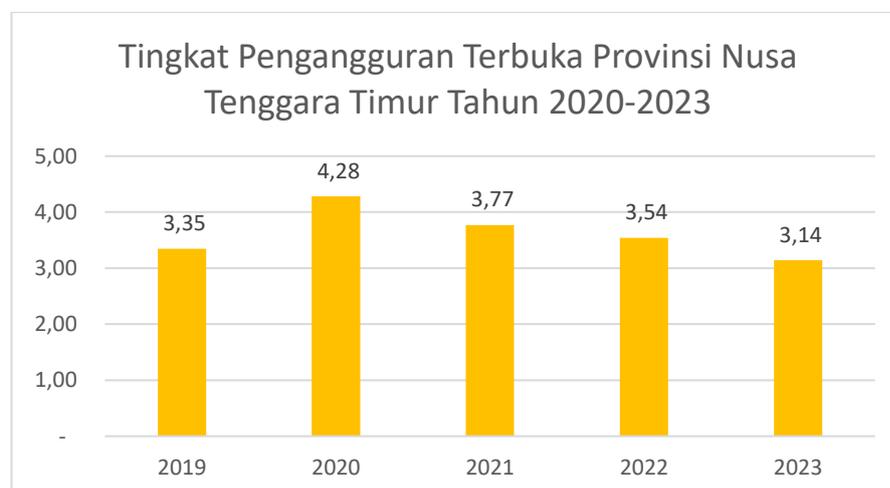
rata nasional sebesar 74,39. Tidak hanya itu, jika dibandingkan dengan provinsi paling dekat yaitu NTB dan Maluku, angka IPM provinsi NTT masih cukup tertinggal karena provinsi terdekat sudah mencapai 70 (Gani & Asmara, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Dalam dimensi pendidikan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Nusa Tenggara Timur mencapai 13,22 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 7,82 tahun pada tahun 2023. Dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah yang ditempuh hanya selama 7 tahun, sedangkan program pemerintah tentang wajib belajar selama 12 tahun. Angka ini masih jauh dari target nasional dan mencerminkan adanya permasalahan dalam akses dan kualitas pendidikan. Faktor geografis berupa kondisi kepulauan, infrastruktur pendidikan yang belum memadai, serta keterbatasan tenaga pendidik berkualitas menjadi tantangan utama dalam meningkatkan capaian pendidikan di Nusa Tenggara Timur.

Dalam dimensi kesehatan dengan indikator Umur Harapan Hidup, berdasarkan data dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur angka UHH sebesar 71,57 pada tahun 2023, maknanya umur harapan hidup bayi yang baru lahir pada periode tahun 2023 memiliki umur harapan hidup selama 71,57 tahun (Anonim, 2023a). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dalam bidang kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati et al., 2021), menjelaskan bahwa IPM memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika IPM meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Di sisi lain, provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Destinasi wisata seperti Taman Nasional Komodo, Pantai Pink, serta kekayaan budaya yang beragam merupakan modal berharga bagi pengembangan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan data dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait jumlah perjalanan wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3.543.816 ribu jiwa pada tahun 2023, menyumbang sebesar 0,66% di PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, angka ini mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Tetapi, mayoritas penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan, dengan jumlah 1.421.199 ribu jiwa pada tahun 2023, sehingga penduduk dominan bekerja di sektor tersebut.

Gambar 1. 4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023 (%)



Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 1.4 menjelaskan bahwa, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,14% pada tahun 2023, meskipun terbilang rendah namun hal ini menunjukkan bahwa tingginya sektor informal yang tidak produktif dan potensi

ekonomi yang ada belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Pengangguran terjadi diakibatkan jumlah angkatan kerja yang tinggi akan tetapi tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan rendahnya daya serap lapangan pekerjaan terhadap angkatan kerja (Sulistiyowati & Aminda, 2022). Tingkat pengangguran terbuka dapat mempengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat, sehingga menyebabkan stagnasi atau bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pengangguran terbuka menjadi krusial untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Putri et al., 2020). Ketergantungan terhadap sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, serta belum optimalnya dalam pemanfaatan potensi pariwisata dan sumber daya kelautan menjadi salah satu faktor yang memperlambat upaya percepatan pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji hubungan antara variabel-variabel pembangunan ini, namun menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Kusumawati et al. (2021) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait IPM, penelitian Rosyidah et al. (2024) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara IPM terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara Prameswari et al. (2021) justru tidak menemukan pengaruh signifikan di wilayah yang sama. Kemudian, penelitian tentang pengaruh tingkat pengangguran menunjukkan hasil yang kontradiktif, penelitian Kusumawati et al. (2021) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negative signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Nairizi (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan antara tingkat

pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Research GAP ini menunjukkan perlunya penelitian lebih spesifik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan fenomena dan didukung adanya *research gap* maka penelitian di wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi menarik untuk dilakukan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur seperti tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya indeks Pembangunan manusia dan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur yang masih berada dibawah rata-rata nasional. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menggunakan data *time series* dalam kurun waktu 15 tahun (2009-2023) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kemiskinan, indeks Pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel independent dan tingkat pertumbuhan ekonomu sebagai variabel dependent.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman mengenai hubungan antara tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Harapannya, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.